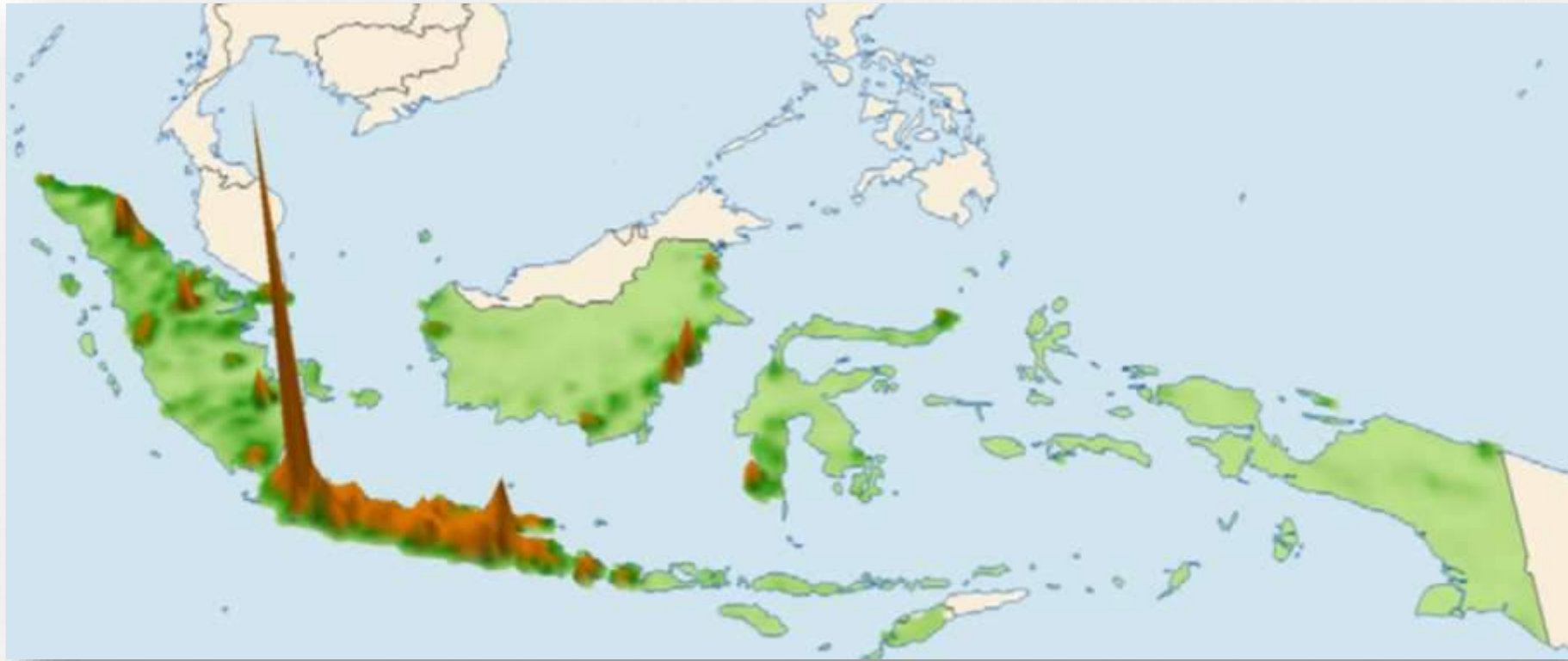


# PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA UNTUK PEMERATAAN EKONOMI



YUDI ADHI PURNAMA

# LANSEKAP EKONOMI INDONESIA



**56,9 %**

atau 150,18 juta penduduk tinggal di Jawa

**59%**

kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB

Krisis air terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur

Masifnya alih fungsi lahan

# JAKARTA TIDAK LAYAK



# KENAPA KALIMANTAN



# THE BEST CITY ON EARTH

## Simbol Identitas Bangsa



- Identitas dan persatuan bangsa untuk *nation and state building*;
- Kebhinekaan Indonesia.

## Modern & Berstandar Internasional



- Pusat *international university, research,* dan *high-tech industry* untuk perekonomian lokal;
- Adanya *smart office* dan *smart hospital*.

## Smart, Green, Beautiful, Sustainable



- *Forest City* sebagai paru-paru dunia;
- Pemanfaatan energi terbarukan;
- Integrasi transportasi publik dengan moda non-motor.

## Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien & Efektif



- Penerapan *Smart Governance* berbasis data;
- Mereformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

## Pendorong Pemerataan Ekonomi di Kawasan Timur



- Mendorong pengembangan *high-tech and clean industries* untuk sektor ekonomi unggulan lokal.

# DAMPAK PEMINDAHAN IBUKOTA

## JANGKA PENDEK/MASA KONSTRUKSI



# DAMPAK PEMINDAHAN IBUKOTA

## JANGKA MENENGAH DAN PANJANG



# 6 KLASER PENDORONG EKONOMI IKN



## Industri Teknologi Bersih

Electric 2W, Manufaktur Solar Panel



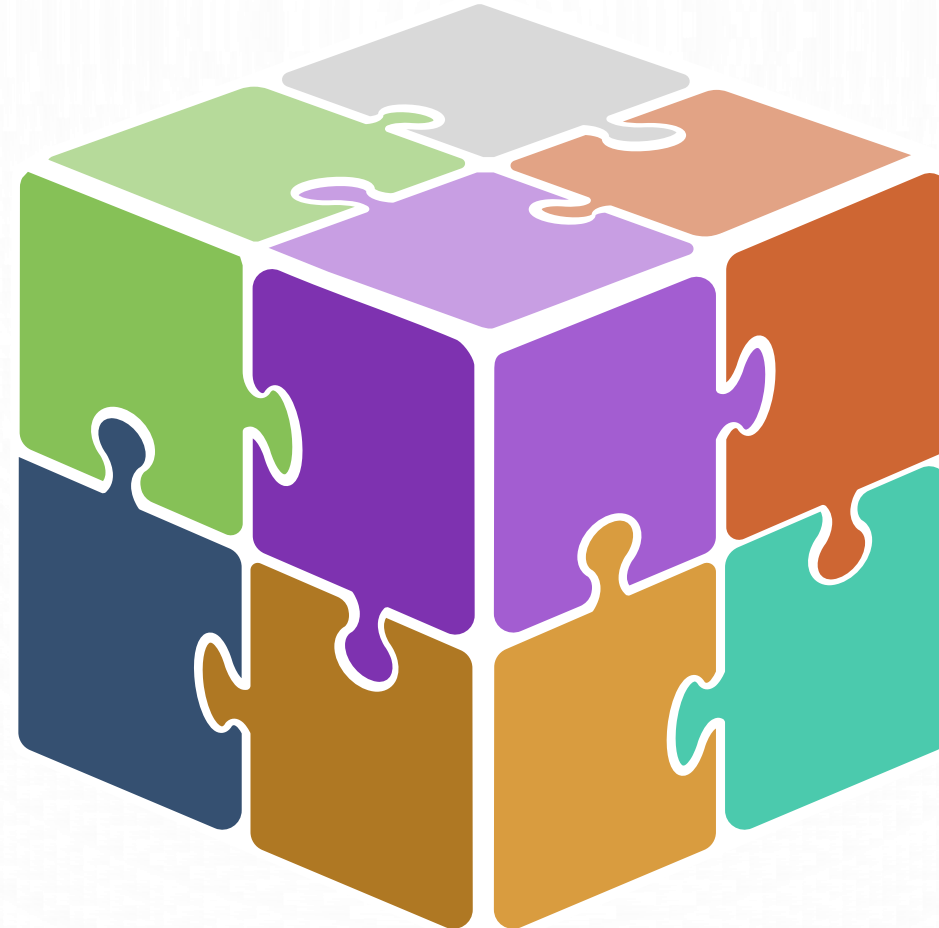
## Farmasi Terintegrasi

API Generik, Bio Similar, Vaksin



## Pertanian Berkelanjutan

Protein Nabati, Produk Herbal dan Bernutrisi, Produk Ekstrak Tumbuhan



## Ekowisata

MICE, Pariwisata Kota, Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran



## Bahan & Produk Kimia

Petrokimia, Oleo Kimia



## Energi Rendah Karbon

Biofuel, Bahan Bakar Sintetis, Gasifikasi Batubara



**Meningkatkan PDRB ke 180 Milyar Dollar**

**4,3- 4,8 Juta lapangan pekerjaan**



# TANTANGAN PEMINDAHAN IKN



# KEBUTUHAN PENDANAAN

Total kebutuhan CAPEX hingga tahun 2024 adalah sekitar Rp 519 triliun, dengan tambahan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp 248 triliun

- Skenario peningkatan: Kontribusi KPBU dan swasta<sup>2</sup>
- Skenario dasar: Kontribusi KPBU dan swasta<sup>3</sup>
- RPJMN 2020-2024
- Kebutuhan CAPEX
- Diditilkan selanjutnya

Rp. Triliun<sup>1</sup>

Estimasi CAPEX dan potensi pembiayaan (2021-2035)<sup>4</sup>

Kebutuhan CAPEX dibandingkan dengan potensi sumber pembiayaan



Selisih kebutuhan CAPEX dengan potensi pembiayaan

		2021-2024	2025-2029	2030-2035
Kebutuhan CAPEX		519	564	209
APBN (RM) 2020-2024 <sup>5</sup>		80	-	-
Kontribusi KPBU dan swasta	Dasar <sup>3</sup>	166	241	128
	Peningkatan <sup>2</sup>	16	72	39
Tambahan kebutuhan pembiayaan		-248	-250	-42

Tambahan pembiayaan diperlukan dari APBN, investasi swasta, atau monetisasi lahan yang dialokasikan ke swasta

<sup>1</sup> Asumsi lama proyek untuk implementasi S-Curve: 3 tahun <sup>2</sup> Estimasi pembiayaan CAPEX melalui KPBU dan sektor swasta berdasarkan persen best in class negara yang ekuivalen <sup>3</sup> Estimasi pembiayaan CAPEX melalui KPBU dan sektor swasta berdasarkan persen Indonesia saat ini <sup>4</sup> Kebutuhan CAPEX tahun 2035-2045 adalah Rp. 503 triliun, tanpa estimasi detail per tahun. Baseline KPBU diasumsikan mulai di tahun 2022 dan peningkatannya di tahun 2024 <sup>5</sup> RPJMN: Alokasi anggaran untuk bangunan strategis TNI dan POLRI diasumsikan menjadi 1 tahun lebih awal (tahun 2021 dan 2022) mengikuti relokasi lebih awal <sup>6</sup> Estimasi kebutuhan biaya untuk Bandara WVIP

# SUMBER PENDANAAN

Total Pendanaan  
**Rp. 466 T**  
Mayoritas KPBU

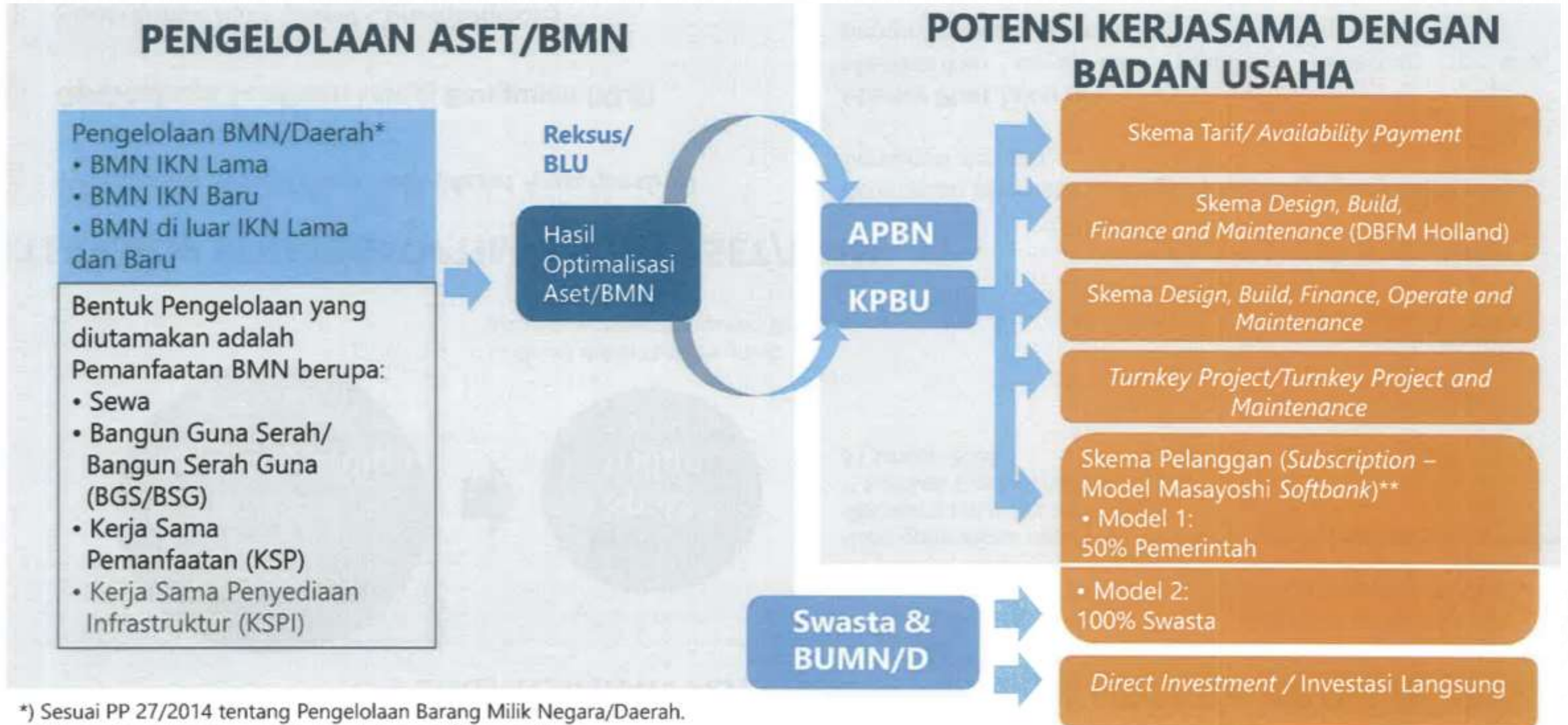


\*) Sebagian menggunakan skema pengelolaan aset/Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme PNPB-earmark.

\*\*) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat berupa Availability Payment (AP) atau Tarif/User Charge. Selain itu, Pemerintah memiliki beberapa skema dalam penyediaan infrastruktur antara lain, yaitu Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

\*\*\*) Bandara dan Pelabuhan diupayakan merupakan pembiayaan BUMN (murni), namun dapat dipertimbangkan menjadi skema KPBU.

# POTENSI PENDANAAN



\*) Sesuai PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

\*\*\*) Usulan investor yang masih diperlukan analisis mendalam.



**TERIMA KASIH**